



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI IMRON
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 427928

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.094.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m²/136 m² di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 432.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m²/136 m² di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 400 m² di LABUHANBATU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 500 m² di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 250 m² di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 17.000.000
6. Tanah Seluas 400 m² di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 800 m² di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 800 m² di MANDAILING NATAL, WARISAN Rp. 30.000.000
9. Tanah Seluas 1500 m² di LABUHANBATU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

39.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI		
Rp. 15.000.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 11.000.000		
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.179.523
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.161.679.523
III. HUTANG	Rp.	237.612.503
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	924.067.020

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ALI IMRON
NIK : 1210020711670001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
Jenis Laporan : Periodik - 2019
Tanggal Kirim : 19 Februari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.